

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI

PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

(STUDI PUTUSAN NOMOR 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024)

TESIS

Oleh:

FREDDY YOSIA TAMPUBOLON

2302190005



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2026

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Freddy Yosia Tampubolon
(2302190005)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2026



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Freddy Yosia Tampubolon
NIM : 2302190005
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (STUDI PUTUSAN NOMOR 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024)”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Januari 2026



Freddy Yosia Tampubolon
NIM: 2302190005



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024)**

Oleh:

Nama : Freddy Yosia Tampubolon
NIM : 2302190005
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

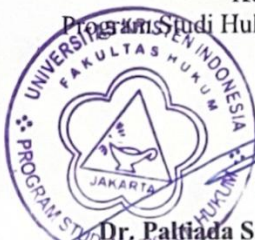
Pembimbing II

Dr. Rr. Ani Wijavati, S.H., M.Hum.
NIP/NUPTK: 901341/5759741642230062

Prof. Dr. Aarce Tehupeior, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 981456/5146743644230093

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191632/5434757658137093



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 31 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Freddy Yosia Tampubolon
NIM : 2302190005
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (STUDI PUTUSAN NOMOR 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024)”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum

Sebagai Ketua

2. Prof. Dr. Aarce Tehupeiori, S.H., M.H

Sebagai Anggota

3. Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc

Sebagai Anggota

Jakarta, 31 Januari 2026



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Freddy Yosia Tampubolon
NIM : 2302190005
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI
PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* (STUDI PUTUSAN NOMOR
975 K/Pdt.Sus-PHI/2024)"**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak *Noneksklusif* tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 31 Januari 2026



Freddy Yosia Tampubolon
NIM: 2302190005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (STUDI PUTUSAN NOMOR 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024)”**

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para pembimbing, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum selaku Pembimbing 1, dan Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H selaku Pembimbing 2, telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Bapak Edward Sirait, S.E., Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum dan Ibu Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H, selaku Pembimbing pada Ujian Penelitian Proposal, yang telah

memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini.

5. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum dan Ibu Prof. Dr. Aarce Tehupeior, S.H., M.H selaku Pembimbing pada Ujian Penelitian Sidang Tesis, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini.
6. Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc selaku Penguji pada Ujian Penelitian Sidang Tesis, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia, yang tidak penulis sebutkan satu per satu.
8. Kepada Orang Tua penulis serta Saudara Kandung penulis yang telah mendukung secara penuh dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum.
9. Kepada Jessica Pania Manik, S.H, selaku kekasih penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada Saut Horas Tamba, S.H., M.H, selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Kristen Indonesia.
11. Kepada Donifan Alfianda, S.E selaku teman masa kecil penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademisi serta praktis di bidang hukum ketenagakerjaan, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Jakarta, 31 Januari 2026

Freddy Yosia Tampubolon
NIM: 2302190005



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Kerangka Teori.....	27
1. Teori Keadilan.....	27
2. Teori Tujuan Hukum.....	31
B. Kerangka Konsep	37
1. Perjanjian Kerja.....	37
2. Hubungan Kerja	49
3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	54
4. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	65
BAB III PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PENGUSAHA KEPADA PEKERJA	72
A. Kasus Pemutusan Hubungan (PHK) Kerja Secara Sepihak.....	72
B. Analisis Putusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak.....	80

BAB IV	<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK</i>	91
A.	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Sebuah Perusahaan.....	91
B.	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	107
C.	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Dan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	112
BAB V	PENUTUP	123
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran.....	124
	DAFTAR PUSTAKA	126



ABSTRAK

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (STUDI PUTUSAN NOMOR 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024)

Dalam hubungan kerja pekerja seringkali diperlakukan secara tidak adil, salah satu perlakuan tersebut yaitu hak-hak pekerja yang tidak dibayar dalam hubungan kerja yang diputus secara sepihak. Hubungan kerja yang diputus secara sepihak merupakan tindakan sewenang-wenang, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan hendaknya dilakukan dengan tertib hukum serta melalui penetapan lembaga hukum demi menjamin bentuk keadilan serta kepastian terhadap hak-hak pekerja.

Jenis penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kasus. Tesis ini juga mengkaji teori keadilan dan tujuan hukum sebagai kerangka analisis. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, tesis ini menganalisis kasus yang terjadi di sebuah perusahaan sebagai contoh konkret. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara yuridis apakah putusan yang dipilih telah memberikan keadilan dan bagaimana pelaksanaan terhadap prinsip *good corporate governance* serta prinsip ini menjamin kepastian hukum pada pekerja. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier). Adapun teknik pengolahan data adalah melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum. Serta analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif untuk mendalami data dan menemukan makna serta hubungan antar variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan prinsip *good corporate governance* pada pemutusan hubungan kerja dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pekerja. Meskipun demikian terdapat tantangan dalam mengimplementasikan prinsip tersebut dan kepatuhan pengusaha terhadap hukum yang berlaku, hal ini menjadi kesenjangan antara hukum dan praktik yang terjadi di lapangan. Saran yang dapat diberikan adalah pekerja harus memahami hak dan kewajibannya, pengusaha harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang berlaku, serta pemerintah harus mengawasi dan membina pengusaha yang tidak patuh terhadap hukum.

Kata kunci: **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), *Good Corporate Governance* (GCG)**

ABSTRACT

TERMINATION OF EMPLOYMENT UNILATERALLY REVIEWED FROM THE PRINCIPLE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDY OF DECISION NUMBER 975 K/Pdt.Sus-PHI/2024)

In employment relationships, workers are often treated unfairly. One such unfair treatment is the non-payment of workers' rights in unilaterally terminated employment relationships. Unilateral termination of employment is an arbitrary act that does not comply with labor laws. Termination of employment should be conducted in accordance with legal procedures and through the determination of legal institutions to ensure justice and certainty regarding workers' rights.

This thesis research employs legislative, analytical, and case study approaches. It also examines theories of justice and the purpose of law as analytical frameworks. Using a case study approach, this thesis analyzes a case occurring in a company as a concrete example. This aims to legally explain and analyze whether the chosen decision has provided justice and how the implementation of the principles of good corporate governance ensures legal certainty for workers. This research uses a normative legal research method, encompassing secondary data consisting of legal materials (primary, secondary, and tertiary). Data processing is carried out through a literature review of various legal sources. Data analysis is conducted qualitatively to examine the data in depth and discover meaning and relationships among variables.

The research results indicate that the decision has fulfilled the sense of justice, and the application of good corporate governance principles in termination of employment can provide legal certainty for workers. Nevertheless, there are challenges in implementing these principles and ensuring employers' compliance with applicable laws, creating a gap between the law and actual practices in the field. Recommendations that can be provided are that workers must understand their rights and obligations, employers must submit to and comply with applicable regulations, and the government must supervise and guide employers who are non-compliant with the law.

Keywords: *Termination of Employment (PHK), Good Corporate Governance (GCG)*